

## Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pulau Jawa Tahun 2010-2020 Dengan Pendekatan Panel *Seemingly Unrelated Regression*

Khairina Putri Ariani<sup>1</sup>, Mahrus Lutfi Adi Kurniawan<sup>2</sup>, Dwi Apriliana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May 10, 2024

Revised May 19, 2024

Accepted May 26 2024

Available online May 30, 2024

#### Kata Kunci:

IPM; Pertumbuhan Ekonomi; Pengeluaran Pemerintah; Panel SUR.

#### Keywords:

HDI; Economic growth; Government Expenditures; SUR Panel.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama dalam penggerak pembangunan. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari beberapa komponen diantaranya yaitu terdiri dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup dapat diketahui dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, TPT, UMP, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2020. Melalui regresi data panel dengan model metode analisis *Seemingly Unrelated Regression* (SUR) dengan pengolahan Stata.14, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap IPM, (2) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM, (3) TPT berpengaruh negatif IPM (4) UMP tidak berpengaruh terhadap IPM, (5) Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM (6) pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM (7) jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, TPT, UMP, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2020.

### ABSTRACT

*The quality of Human Resources is the main factor in driving development. To measure the welfare of society as seen from several components, including health, education and living standards, it can be determined from the value of the Human Development Index (HDI). This research aims to analyze the influence of the number of poor people, economic growth, TPT, UMP, government spending in the education and health sectors on the Human Development Index (HDI) in provinces on the island of Java in 2010-2020. Through panel data regression using the Seemingly Unrelated Regression (SUR) analysis method model with Stata.14 processing, the results of this study show that (1) the number of poor people has a negative effect on HDI, (2) economic growth has a negative effect on HDI, (3) TPT negative effect on HDI (4) UMP has no effect on HDI, (5) government spending in the education sector has a positive effect on HDI (6) government spending in the health sector has no effect on HDI (7) number of poor people, economic growth, TPT, UMP, government spending the education and health sectors together have an influence on the provincial Human Development Index (HDI) on the island of Java for 2010-2020.*

### PENDAHULUAN

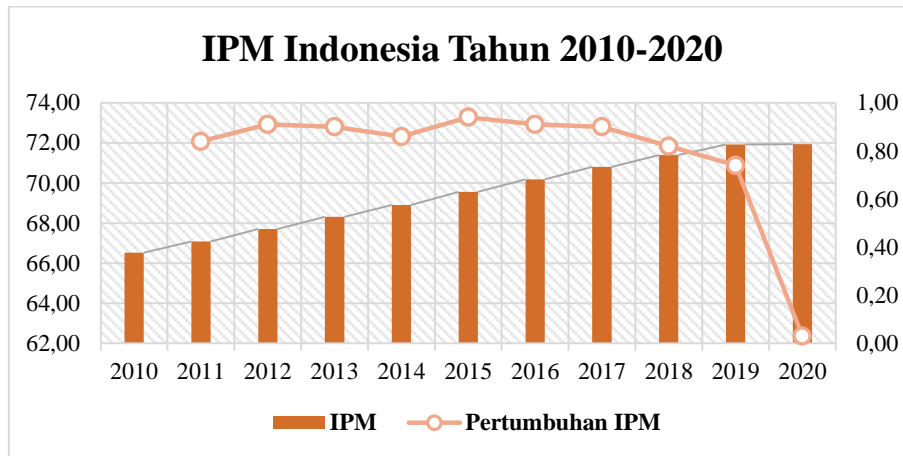
Proses pembangunan terdiri dari berbagai perubahan pada struktur sosial, perilaku masyarakat dan institusi nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000). Kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang harus ditangani selama proses pembangunan suatu negara (Suripto & Istanti, 2009). Karena kemiskinan merupakan masalah nasional yang tidak dapat ditunda, pemetaan kemiskinan harus mendapatkan prioritas tertinggi dalam pembangunan (Az zakiyyah et al., 2023). Menurut (Wibowo & Khoirudin, 2019) pengurangan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Menurut Badan Pusat Statistika Indeks Pembangunan Manusia tiap tahunnya terus meningkat, urutan IPM di ASEAN, Indonesia menempati urutan keempat tetapi dari banyaknya provinsi di Indonesia hanya 2 provinsi yang mempunyai nilai IPM 75-80% yakni DKI Jakarta dan DIY, sedangkan 4 lainnya masih dibawah 75%. (Kurniawan & Khasanah, 2024). Pada era globalisasi saat ini, bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia (Rohimah & Khoirudin, 2016). Di tengah tingginya minat terhadap pariwisata saat ini, banyak inovasi yang bermunculan dari peluang yang ada (Pastiwi et al., 2023). Manajemen aset diperlukan untuk

\*Corresponding author

E-mail address: [khairina1800010130@webmail.uad.ac.id](mailto:khairina1800010130@webmail.uad.ac.id)<sup>1</sup>, [mahrus.kurniawan@ep.uad.ac.id](mailto:mahrus.kurniawan@ep.uad.ac.id)<sup>2</sup>, [dwi2100010030@webmail.uad.ac.id](mailto:dwi2100010030@webmail.uad.ac.id)<sup>3</sup>

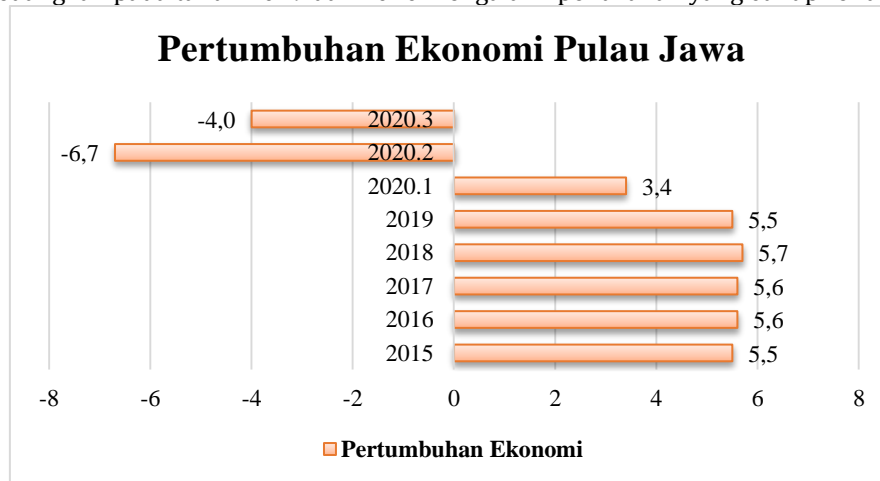
mengevaluasi dan meningkatkan sistem layanan dan sumber pendapatan yang efisien untuk menurunkan biaya melalui langkah-langkah pemotongan biaya yang berorientasi pada keuntungan (Jati et.al., 2023)

Nilai IPM dapat dijadikan sebagai tolak ukur perbandingan kinerja pembangunan di setiap negara.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Capaian IPM dan Pertumbuhan IPM Nasional Tahun 2010-2020  
 Sumber: BPS, data diolah (2021)

Dalam gambar tersebut menunjukkan grafik status pembangunan secara nasional dengan tingkat pencapaiannya level tertinggi, namun pertumbuhan IPM di tahun 2020 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Perlambatan IPM selain karena dampak dari pandemi yang mulai masuk di Indonesia pada awal 2020, disebabkan karena penurunan dimensi standar hidup layak. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh perkembangan ekonomi terhadap IPM, dalam penelitian (Dewi et.al, 2017) ketika pertumbuhan ekonomi naik maka akan terjadi perubahan pada IPM, dilihat dari wilayah atau daerah yang memiliki angka IPM tinggi maupun pada wilayah yang memiliki angka IPM rendah. Dalam tabel 2 di bawah ini, pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa mengalami peningkatan pada tahun 2015-2018, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang cukup rendah.



Sumber: BPS, Data diolah (2021)  
 Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa Tahun 2015-Triwulan III/2020 (%YoY)

Kemajuan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonominya. Badan Pusat Stasistika menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikarenakan adanya sumbangan kegiatan ekonomi di Pulau Jawa, dimana tahun 2020 mencapai 58,72% dari total kegiatan ekonomi nasional. Pada Penelitian terdahulu mendorong riset studi yang dilakukan (Subagyo & Algifari, 2013) tentang sebab dan akibat pembangunan manusia dan perkembangan ekonomi baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa menunjukkan perkembangan ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap IPM. (Khoirudin & Kusuma, 2016) Pada umumnya setiap Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperluas usahanya, hal ini dilakukan dengan mengadakan ekspansi. (Lestari dkk, 2017) Pada umumnya masyarakat yang dianggap bahagia adalah masyarakat yang makmur secara ekonomi karena memiliki pendapatan yang tinggi atau dengan kata lain memiliki pendapatan per

kapita tinggi. IPM di Pulau Jawa menjadi yang tertinggi dengan nilai 74,84 pada tahun 2020, akan tetapi perbandingannya tidak begitu signifikan dengan beberapa pulau lainnya, seperti di Pulau Sumatera hanya terpaut sekitar 0,07 dengan nilai IPM 74,77 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Simreg.bappenas.go.id, data diolah (2022)

Gambar 3 Diagram Capaian Perbandingan IPM 5 Pulau Terbesar di Indonesia Tahun 2020

Selain masalah pertumbuhan yang menjadi salah satu faktor dalam pembangunan manusia, terdapat faktor lain sebagai pendorong maupun penghambat proses pembangunan manusia terutama yang mempengaruhi langsung sektor pembangunan, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur tingkat standar hidup masyarakat, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi tinggi maka standar hidup warganya tinggi (Kurniawan & Prawoto, 2014). Untuk menilai kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui tingkat pendapatan, dimana ketika pendapatan tinggi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar sehingga pendapatan tinggi menyebabkan jumlah konsumsi rumah tangga meningkat. Tingginya pendapatan tidak lain karena peningkatan upah minimum, kenaikan upah minimum akan menyebabkan peningkatan kehidupan yang layak sehingga standar hidup layak meningkat dan daya beli masyarakat juga meningkat yang akan memberikan dampak positif terhadap IPM (Sari & Yusniar, 2019). Tingginya tingkat pengangguran juga dapat menyebabkan rendahnya pendapatan yang memicu munculnya masalah kemiskinan. Kemiskinan tersebut muncul akibat tidak bisa terpenuhinya kebutuhan dasar (*Basic needs*) sehingga apa yang diungkapkan oleh Amartya Sen (dalam Todaro & Smith, 2011) mengenai kesejahteraan yang menyangkut kesehatan, keadaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, dan pendidikan tidak dapat terpenuhi oleh kemampuan masyarakat dan berdampak pada kemerosotan dalam pembangunan manusianya.

Permasalahan lainnya yaitu pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai cerminan kebijakan diambil oleh pemerintah. (Sukirno, 2005) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat guna mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas modal manusia dari sisi pendidikan dan kesehatan. Karena dianggap sebagai sumber daya manusia, pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan (Suripto et al., 2020). Menurut (Hardiansah, 2019) peningkatan pada pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pada pembangunan manusia selain itu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan investasi yang akan datang dari pemerintah guna mewujudkan kualitas manusia yang lebih baik dan dampak yang terjadi dalam kebijakan ini tidak berpengaruh secara langsung atau pada jangka waktu tertentu baru dirasakan hasilnya. (Bagaskara, 2023) Sektor perumahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih jauh tentang permasalahan pembangunan manusia serta pengaruh yang mempengaruhi pembangunan manusia, sehingga tertarik meneliti "Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pulau Jawa Tahun 2010-2020 Pendekatan Panel *Seemingly Unrelated Regression*".

## METODE

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data panel yang berbentuk *time series*. Selain itu data kuantitatif penelitian ini menggunakan data panel, data panel merupakan campuran antara data *time series* dengan *cross section*. Penelitian ini menggunakan populasi berupa data-data yang berhubungan terhadap IPM di Pulau Jawa pada tahun 2010-2020. Penelitian ini didapatkan dari data sekunder di mana informasi sumber data yang diperoleh melalui website resmi serta akurat dari Badan Pusat Statistika

(BPS), Bank Indonesia (BI), kemendikbud, dan kemenkeu. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan penimbangan panel SUR (*Seemingly Unrelated Regression*) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{1t} = \beta_0 + \beta_{11}X_{11,t} + \dots + \beta_{1K1}X_{1K1,t} + e_{1t}$$

$$Y_{2t} = \beta_{20} + \beta_{21}X_{11,t} + \dots + \beta_{2K2}X_{2K2,t} + e_{2t}$$

$$Y_{Gt} = \beta_{G0} + \beta_{G1}X_{G1,t} + \dots + \beta_{GK2}X_{GK2,t} + e_{Gt}$$

Keterangan:

t= 1,2,3...n.

## HASIL

### a. Uji Stasioner atau uji akar unit

Uji stasioner dilakukan karena pada penelitian ini data *time series* lebih banyak dibandingkan dengan data *cross-section* sehingga diperlukan uji stasioner pada data. Apabila data stasioner, maka data akan terhindar dari regresi yang meragukan, pada penelitian yang dilakukan ini membandingkan pada tingkat level dan 1<sup>st</sup> difference melalui pendekatan Levin Lin Chu Test (LL), Augmented Dickey-Fuller (ADF), dan Fisher-Philips Perron (PP). Apabila uji hasil menunjukkan nilai probabilitas dibawah 0,050 artinya variabel tersebut stasioner, dan sebaliknya ketika nilai probabilitas diatas 0,050 variabel tersebut tidak stasioner. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2 Hasil Uji Stasioner Tingkat Level**

Variabel	Level		
	Phillips-Perron (PP)	Augmented Dickey-Fuller (ADF)	Levin, Lin, Chu (LL)
IPM	-2,081 (0,018)	-0,581 (0,280)	-5,107 (0,000)***
Jumlah Penduduk Miskin	-3,374 (0,000)***	-0,873 (0,181)	-2,227 (0,013)*
Pertumbuhan Ekonomi	-1,762 (0,039)	-1,286 (0,099)	-2,369 (0,008)**
TPT	-2,260 (0,011)**	-2,130 (0,016)*	-2,530 (0,005)***
UMP	-1,142 (0,126)	-0,892 (0,186)	-4,827 (0,000)***
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	-2,587 (0,004)***	0,630 (0,735)	-0,612 (0,270)
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	-1,334 (0,091)	0,586 (0,721)	0,584 (0,013)*

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Ket: \*\*\*=1%(0,01);\*\*=5%(0,05);\*=10%(0,10)

**Tabel 3 Hasil Uji Stasioner Tingkat 1<sup>st</sup> difference**

Variabel	1 <sup>st</sup> difference		
	Phillips-Perron (PP)	Augmented Dickey-Fuller (ADF)	Levin, Lin, Chu (LL)
IPM	-1,866 (0,031)*	-1,282 (0,099)	-2,388 (0,008)**
Jumlah Penduduk Miskin	-4,222 (0,000)***	-3,723 (0,000)***	-4,492 (0,000)***
Pertumbuhan Ekonomi	2,370 (0,0991)	1,328 (0,908)	-3,048 (0,001)***
TPT	-4,739 (0,000)***	-2,508 (0,006)**	-3,935 (0,000)***
UMP	-4,734 (0,000)***	-2,101 (0,017)*	-5,852 (0,000)***
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	-7,574 (0,000)***	-3,391 (0,000)***	-4,424 (0,000)***
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	-6,192 (0,000)***	-3,035 (0,001)***	-4,035 (0,000)***

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Ket: \*\*\*=1%(0,01);\*\*=5%(0,05);\*=10%(0,10)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian unit root test dengan tingkat level baik dengan metode pendekatan LL, ADF, dan PP terdapat beberapa variabel tidak stasioner. Untuk mendapatkan data stasioner dapat dilakukan dengan mengubah tingkat level menjadi tingkat 1st difference atau mengurangi data dengan data periode sebelumnya, ketika pada tingkat 1st difference melalui pendekatan Levin Lin Chu Test (LL) menunjukkan seluruh variabel pada data stasioner dengan tingkat probabilitas <0,050, ketika pendekatan diubah pada ADF dan PP variabel dependen IPM dan variabel Independen pertumbuhan ekonomi tidak stasioner. Sehingga peneitian dapat dilanjutkan karena data menjukkan hasil yang stasioner pada tingkat 1st difference melalui pendekatan Levin Lin Chu Test (LL).

#### b. Hasil Uji Data Panel

Pemaparan hasil uji pada data panel dilakukan untuk melihat dan membandingkan metode yang tepat dalam penelitian yang dilakukan. Model regresi data panel sendiri terbagi menjadi tiga model yakni *Common Effect* atau *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect*, dan *Random Effect* yang akan dibandingkan dengan estimasi model SUR (*Seemingly Unrelated Regression*). Menurut Tekin (2012) dan widyaningsih, susilawati, dan sumarjaya (2014) penerapan metode SUR dapat memberikan asumsi homokedastisitas dan tidak ada autokorelasi yang akan menimbulkan *Best Linier Unbiased Estimator*.

**Tabel 4 Hasil Uji Data Panel**

Variabel	CEM	FEM	REM	SUR
Jumlah Penduduk Miskin	-3,424 (0,280)***	-4,221 (0,550)***	-3,424 (0,280)***	-3,424 (0,204)***
Pertumbuhan Ekonomi	-0,204 (0,090)*	-0,028 (0,027)	-0,204 (0,090)*	-0,204 (0,067)***
TPT	-0,654 (0,076)***	0,015 (0,052)	-0,654 (0,076)***	-0,654 (0,052)***
UMP	1,215 (0,814)	4,148 (0,259)***	1,215 (0,814)	1,215 (0,661)
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	0,771 (0,187)***	0,120 (0,049)*	0,771 (0,187)***	0,771 (0,245)***
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	0,011 (0,230)	0,074 (0,183)	0,011 (0,230)	0,011 (0,152)

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Ket: \*\*\*=1%(0,01);\*\*=5%(0,05);\*=10% (0,10)

Dari hasil perhitungan *commond effect model*, variabel jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, TPT, dan anggaran fungsi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM hal tersebut karena nilai probabilitas < 0,050. Sedangkan untuk variabel UMP dan anggaran fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM hal tersebut karena nilai probabilitas > 0,050. Perhitungan dari hasil estimasi *fixed effect model* menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, TPT, dan anggaran fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM dikarenakan nilai probabilitas lebih besar dari alpha 5%, sedangkan untuk variabel jumlah penduduk miskin, UMP, dan anggaran fungsi pendidikan berpengaruh terhadap IPM. Hasil perhitungan pada estimasi *random effect model* menunjukkan bawah variabel UMP dan anggaran fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM karena nilai probabilitas lebih besar dari alpha 5%. Sedangkan variabel jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, TPT, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap IPM.

#### c. Uji Spesifikasi Model

##### 1) Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pemilihan metode yang tepat digunakan antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Pada perhitungan F statistik dan F tabel uji chow berikut ini:

**Tabel 5 Hasil Uji Chow**

Test Summary	Prob.
F (6, 54) = 367,40	0,0000

Sumber: hasil olah data 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada uji chow terlihat nilai probabilitas adalah 0,0000 atau < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 di tolak dan terima H1 maka dalam uji chow ini efektif menggunakan FEM.

##### 2) Uji Hausman

Uji hasuman dilakukan untuk memilih antara FEM atau REM yang baik digunakan, ketika hasil uji hausman menerima  $H_0$  maka REM cocok diterapkan namun ketika hipotesis tolak  $H_0$  maka FEM yang baik diterapkan.

**Tabel 6 Hasil Uji Hausman**

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Prob&gt;Chi2</i>
<i>Cross-section random</i>	69,05	0,000

Sumber: hasil olah data 2024.

Dari hasil tabel tersebut diperoleh nilai probabilitas pada hasil uji sebesar 0,000, artinya  $< 0,050$  maka hasil uji hausman tolak  $H_0$  untuk itu model yang baik digunakan adalah FEM. Dari hasil uji chow dan uji hasuman model cocok menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*, namun dengan melihat perbandingan antara hasil FEM dengan SUR, nilai koefisien dan standar error lebih kecil sehingga lebih efisien menggunakan SUR dibandingkan dengan *Fixed Effect Model*, selain itu dilihat dari nilai probabilitasnya juga lebih kecil.

### 3) Uji Statistik F

Uji F dilakukan guna melihat besarnya pengaruh secara keseluruhan pada variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana secara bersamaan variabel independen dapat dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai alpha 0,05. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 7 Hasil Uji F**

<b>Prob (F-statistic)</b>	<b>0,0000</b>
---------------------------	---------------

Sumber: Hasil olah data 2024.

Pada tabel di atas nilai uji F sebesar 0,0000 yang artinya nilai probabilitas  $< 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa signifikan di taraf signifikan alpha 5%, yang berarti variabel jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, TPT, UMP, fungsi pendidikan, dan fungsi kesehatan bersamaan atau secara simultan mempengaruhi variabel IPM.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil estimasi dengan metode yang digunakan adalah SUR diolah menggunakan stata.14 sebagai berikut:

**Tabel 9 Hasil Uji SUR**

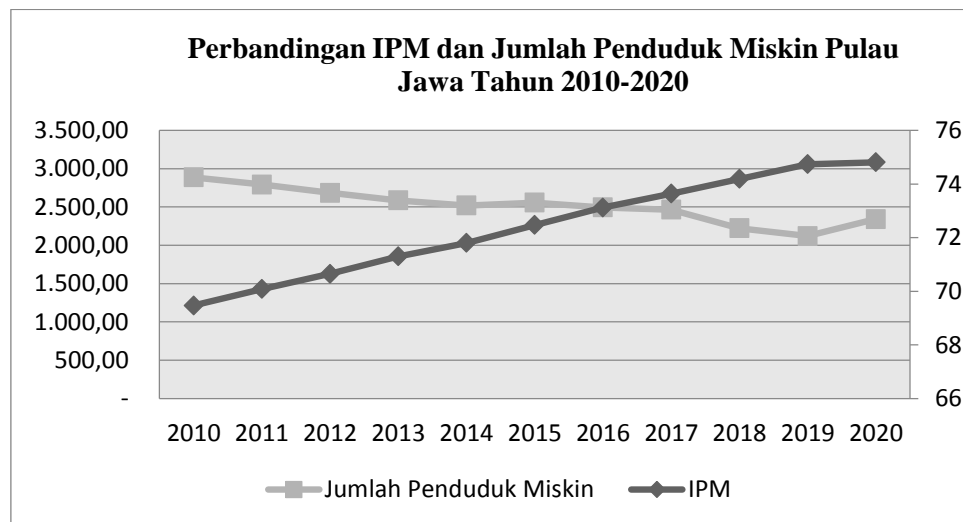
<b>Variabel</b>	<b>Coef.</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Z</b>	<b>p&gt; z </b>
Jumlah Penduduk Miskin	-3,424	0,204	-16,72	0,000
Pertumbuhan Ekonomi	-0,204	0,067	-3,04	0,002
TPT	-0,654	0,052	-12,49	0,000
UMP	1,215	0,661	1,84	0,066
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	0,771	0,245	3,14	0,002
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	0,011	0,152	0,07	0,942
Cons	63,671	6,300	10,11	0,000

Sumber: hasil olah data 2024.

Dari hasil tabel di atas faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di pulau jawa dianalisis secara ekonomi dan pembahasan hipotesis, sebagai berikut:

Pada hasil panel SUR, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas pada variabel independen jumlah penduduk miskin sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari alpha 5% atau 0,050, sehingga disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia dikarenakan nilai koefisien sebesar -2,461, yang artinya ketika terjadi kenaikan 1 persen IPM akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,461 persen. Hasil tersebut sejalan terhadap penelitian yang dilakukan (Kyswanto, 2017) dimana jumlah penduduk miskin berpengaruh secara signifikan terhadap HDI pada 6 daerah tertinggal di Pulau Jawa.

Dapat dilihat dalam gambar 3 yang menunjukkan instabilitas antara indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) pada 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2010-2020.



Sumber: Data BPS (Data diolah)

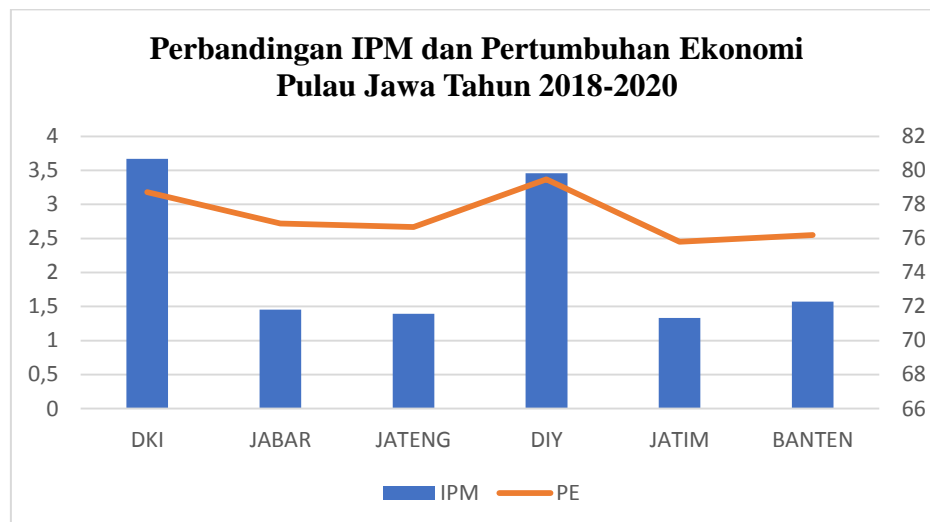
Gambar 3. Grafik IPM dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa

Dengan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa penurunan jumlah penduduk miskin mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa. Namun terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 dan 2020, peristiwa itu dikarenakan adanya kondisi ekonomi pada tahun tersebut. Pada tahun 2015 dikarenakan terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak pada bulan November tahun lalu, namun meskipun per Januari 2015 harga BBM turun, harga barang dan jasa tidak ikut turun selain itu adanya peningkatan tarif listrik yang diterapkan untuk masyarakat pemakai listrik 450 – 900volt ampere sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang menurun. Adanya kenaikan tersebut menyebabkan inflasi bagi masyarakat, dengan meningkatnya inflasi akan berpengaruh terhadap naiknya garis kemiskinan yang menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah.

Pada tahun 2020 kurva jumlah kemiskinan menunjukkan peningkatan sebesar 221,61 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi yang mulai masuk di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, Pulau Jawa mengalami peningkatan kemiskinan tertinggi dikarenakan tingkat kepadatan penduduk selain itu peningkatan penduduk miskin tertinggi diduduki oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa menurun yaitu pendapatan masyarakat menengah ke atas yang mana akan mempengaruhi tingginya daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi, sehingga akan meningkatkan angka IPM (Kusumaningrum, 2018) dan sebaliknya ketika pendapatan menurun akan mempengaruhi rendahnya daya beli dan tingkat konsumsi sehingga angka IPM turun, hal tersebut sejalan dalam teori kemiskinan lingkaran setan yang dikemukakan oleh Nurkse pada sisi permintaan.

Berdasarkan hasil uji panel SUR menunjukkan nilai probabilitas pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,002 nilai tersebut lebih kecil dari alpha 5 % atau 0,050 sehingga dapat diartikan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia secara negatif ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,204 yang artinya apabila terjadi kenaikan IPM sebesar 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,204. Hasil tersebut sejalan pada penelitian yang dilakukan (Noviatamara et al., 2019).

Hasil penelitian ini bertolak belakang terhadap teori klasik bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi dikarenakan pertumbuhan jumlah output. Dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia disebabkan pencapaian dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan tidak dipusatkan dalam peningkatan kualitas manusia, Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harusnya dilakukan secara berkelanjutan dengan mengarah pada pembangunan manusia dan kebijakan makro agar meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan pembangunan manusia (Anantika & Sasana, 2020). Dapat dilihat dalam perbandingan grafik antara IPM dan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa di bawah ini



Sumber: Data Sekunder, BPS (Data diolah)

Gambar 4. Perbandingan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2020

Pada gambar 4 terbukti bahwa IPM dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah Pulau Jawa berbeda-beda sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga akan merubah pola konsumsi masyarakat dan 3 komposit IPM yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi akan meningkat, tetapi dalam penelitian ini menghasilkan hal yang berbeda dikarenakan data presentase pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di provinsi Pulau Jawa pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak difokuskan pada kualitas pembangunan manusia namun infrastruktur. Ketika infrastruktur di kedepankan akan berdampak positif maupun negatif, dampak positif terjadi pada fasilitas daerah yang baik akan lebih aktif dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan investasi di setiap daerah, dampak negatif nya keuntungan yang diperoleh dari infrastruktur akan lebih dirasakan oleh kaum tinggi sedangkan rakyat kecil tidak dapat merasakan keuntungan secara langsung karena pengeluaran pemerintah yang hanya mengedepankan pembangunan infrastruktur. Namun apabila pertumbuhan ekonomi fokus pada pembangunan manusia maka akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan seperti pendidikan, kesehatan, daya beli dan lainnya sehingga dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

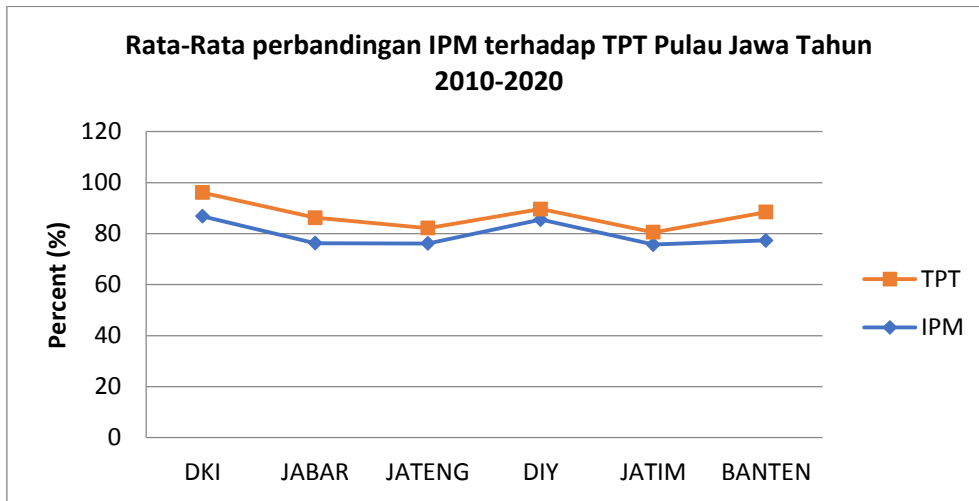
Berdasarkan uji panel SUR variabel TPT menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari alpha 5% sehingga TPT berpengaruh terhadap IPM secara negatif dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,654 yang artinya ketika terjadi kenaikan IPM 1% maka akan menyebabkan penurunan TPT sebesar 0,654, hasil tersebut sejalan dalam penelitian (Sania et al., 2021).

Dalam hasil penelitian yang dilakukan ini ketika jumlah pengangguran meningkat maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena kurangnya pendapatan sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup serta merubah kualitas hidupnya yang merupakan pengaruh dominan pada peningkatan pembangunan manusia, sehingga tidak mampu dalam memperbaiki kualitas manusia seperti membayar biaya pendidikan dan kesehatan (Sania et al., 2021).

Terjadinya peningkatan pengangguran di provinsi Pulau Jawa dalam 2 tahun terakhir yakni 2019 dan 2020, diikuti dengan turunnya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya indeks pembangunan manusia. Faktor yang menyebabkan tingginya pengangguran di 2 tahun terakhir karena adanya pandemi yang menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaannya. Dapat dilihat dalam grafik gambar 5 membuktikan bahwa ketika IPM meningkat kurva TPT mengalami penurunan.

Di lain sisi bertambahnya tingkat pengangguran yang dengan kemiskinan yang mana sebagian besar penduduk bergantung pada pendapatan, sehingga ketika pekerjaan hilang dapat menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Artinya bahwa semakin tinggi pengangguran akan meningkatkan kemiskinan, yang jangka panjang akan berdampak pada rendahnya IPM.



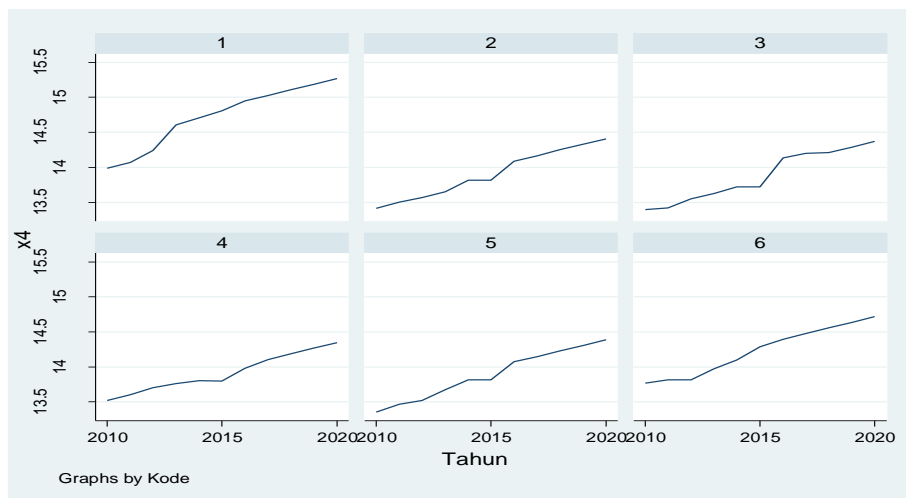


Sumber: Data Sekunder, BPS (Data diolah)

Gambar 5. Rata – Rata Pengeruh IPM terhadap TPT Pulau Jawa Tahun 2010-2020

Dari hasil uji panel SUR, diketahui bahwa variabel UMP memiliki nilai probabilitas sebesar 0,066, nilai tersebut lebih besar dari alpha 5%, sehingga disimpulkan bahwa UMP tidak berpengaruh terhadap IPM, hal tersebut sejalan pada penelitian (Charitin, 2021). Dengan adanya hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah daerah di tingkat provinsi menentukan upah minimum untuk masing-masing daerah, sedangkan kota atau kabupaten mempunyai pilihan mengikuti atau menentukan upah minimum diatas tingkat upah minimum propinsi namun tidak berada di bawah upah minimum provinsi (UMP). Peningkatan UMP akan berdampak dalam kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, menjadikan peningkatan upah minimum provinsi yang ditetapkan, dan meningkatkan kemampuan daya beli (*purchasing power*) penduduk Indonesia berdasarkan KHL, sehingga dapat memudahkan penduduk memperluas pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian daripada dimensi IPM (Harjunadhi & Rahmawati, 2020).

Apabila upah minimum mampu mencukupi kebutuhan manusia maka akan menciptakan kesejahteraan pada masyarakat tersebut sehingga memperoleh pendidikan yang akan menciptakan penduduk melek pendidikan serta menurunkan angka putus sekolah, keadaan tersebut sejalan pada konsep IPM yang dipublikasikan oleh UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1990 tentang pembangunan manusia. Dapat dijabarkan dalam hasil penelitian yang dilakukan ini bahwa variabel UMR tidak mempengaruhi IPM, hal ini disebabkan adanya disparitas upah yang berlangsung antar wilayah karena kebutuhan hidup layak tiap daerah berbeda, sehingga upah minimum tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap IPM. Perbedaan upah di setiap wilayah dapat dilihat dalam gambar 6 di bawah ini



Sumber: Data Sekunder, BPS (Data diolah)

Gambar 6 Perbandingan Upah antar Provinsi Pulau Jawa

Berdasarkan uji panel SUR variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,002 dapat dikatakan nilai tersebut lebih kecil di dibandingkan alpha 5% sehingga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap IPM. Nilai koefisien pada variabel tersebut sebesar 0,771 yang artinya setiap terjadi kenaikan IPM sebesar 1% maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 0,771%.

Hasil tersebut sejalan dalam penelitian yang dilakukan (Ramadhan, 2018) yang sesuai dengan teori hasil penelitian (Meier & Rauch, 2000) bahwa pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia mampu berkontribusi pada pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya pendidikan merupakan wujud dari tabungan yang mengakibatkan penambahan modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Dalam penelitian ini juga disimpulkan bahwa pengalokasian belanja pendidikan di Provinsi Pulau Jawa tepat dalam menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan melalui data yang menunjukkan peningkatan realisasi belanja pendidikan diikuti dengan peningkatan IPM Provinsi Pulau Jawa tahun 2010-2020, yang mana ketika adanya peningkatan pengeluaran pendidikan kesejahteraan masyarakat juga meningkat yang dibuktikan dari nilai IPM. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adanya hubungan positif disebabkan karena adanya bantuan atau belanja negara terhadap sektor pendidikan yang mengakibatkan masyarakat melek terhadap huruf dan lebih lama bersekolah, selain itu pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan dasar akan menjadikan individu lebih produktif (Todaro & Smith, 2003). Semakin meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat akan semakin mudah dalam menerapkan kemajuan teknologi sehingga mampu meningkatkan standar perekonomian. Peningkatan tingkat pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagaimana diketahui bersama, pendidikan merupakan salah satu urusan kongruen yang tanggung jawabnya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini, sekitar 63 persen anggaran fungsi pendidikan disalurkan pemerintah ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan semakin proaktif dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud, 2019).



Sumber: Data Sekunder, BPS (Data diolah)

Gambar 7 Perbandingan Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Pulau Jawa

Selain itu besarnya anggaran pendidikan lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran kesehatan di Pulau Jawa meskipun pengeluaran pendidikan di DKI lebih rendah, namun apabila dibandingkan dari 6 provinsi dominan pada tingkat pengeluaran sektor pendidikan lebih tinggi dibanding sektor kesehatan yang dapat dilihat pada gambar 7. Berdasarkan hasil uji panel SUR variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pada nilai probabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM

karena nilai probabilitas sebesar 0,942 sehingga lebih besar dari nilai alpha 5%. Hasil tersebut sejalan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Muliza et al., 2017).

Adanya hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan akan berdampak pada tingginya indeks pembangunan manusia di tiap wilayah tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dimanfaatkan dalam membiayai sarana dan prasarana pada bidang kesehatan di suatu wilayah akan berpengaruh pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian dan peningkatan angka harapan hidup masyarakat pada wilayah tersebut (Anantika & Sasana, 2020). Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM dikarenakan anggaran yang disalurkan untuk sektor kesehatan belum terealisasi dengan baik hal ini terlihat dari data yang menunjukkan sedikitnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sehingga perlu adanya tindakan dari dinas kesehatan untuk turun langsung guna meningkatkan fasilitas perlengkapan dan peralatan kesehatan supaya tingkat indeks pembangunan manusia dapat meningkat lebih baik dan pertumbuhan peningkatan indeks pembangunan manusia yang lebih besar. Selain itu perkembangan anggaran kesehatan dengan capaian beberapa indikator yang telah dijabarkan masih menunjukkan hal yang kontradiktif, dimana perkembangan anggaran kesehatan terus mengalami peningkatan khususnya di masa pemulihan ekonomi yang sedang terjadi, namun untuk capaian output yang dihasilkan menunjukkan hal yang sebaliknya. Capaian indikator kesehatan menunjukkan rata-rata tren penurunan atau perlambatan, hal tersebut merupakan sinyal untuk pemerintah khususnya di bidang kesehatan, agar target-target optimistic yang telah disusun dalam RKP serta RPJMN mampu dicapai tentunya bukan hal yang mudah terlebih dengan situasi pandemi yang masih berlangsung (Pusat Kajian Anggaran DPR).

## SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

- a. Variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh secara negatif terhadap IPM. Artinya, setiap terjadinya kenaikan IPM akan menurunkan jumlah penduduk miskin.
- b. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif terhadap IPM. Artinya, setiap terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan IPM.
- c. Variabel TPT berpengaruh secara negatif terhadap IPM. Artinya setiap terjadi peningkatan IPM akan menurunkan TPT.
- d. Variabel UMP tidak berpengaruh terhadap IPM.
- e. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara positif terhadap IPM. Artinya setiap terjadi peningkatan IPM akan meningkatkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan.
- f. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM.
- g. Variabel jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, TPT, UMP, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama mempengaruhi IPM.

## REFERENSI

- Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara APEC. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(3), 168–178.
- Bagaskara. (2023). Modelling the Drivers of Housing Price using Autoregressive Distributed Lag – Error Correction Model (ARDL-ECM) in Indonesia. *Journal of Asset Management and Public Economy*, 2(1), 53-64. <https://doi.org/10.12928/jampe.v2i1.6696>
- Charitin, D. (2021). Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Tingkat Inflasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nunukan. *Jurnal Ekonomika*, 12(01), 51–64.
- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2017). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Harjunadhi, J. T., & Rahmawati, F. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan UMP terhadap IPM di Indonesia Tahun 2014–2018. *Inovasi Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 16(2), 241–249.
- Hasiani, F. (2015). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pelalawan. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Jati, D., Setiawan, H., Purnomo, S.D., Muntahanah, S., Zuhaena, F. & Arinastuti. 2023. Determinants of

- Profitability : Evidence from Construction Companies Listed on Indonesian Securities Market. *Journal of Asset Management and Public Economy*, 2(2), 108-118. <https://doi.org/10.12928/jampe.v2i2.7905>
- Kurniawan, M. L. A., & Prawoto, N. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Dan Penentuan Titik Ambang Batas Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(1), 71-77.
- Kusumaningrum, R. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2006-2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Kurniawan, M.L.A. & Khasanah, D.U. (2024). Panel Seemingly Unrelated Regression on Employment in Tourism Sector: Evidence in Central Java Province. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* 19(1), 11-19. <https://doi.org/10.32424/1.erjpe.2024.19.1.3369>
- Khoirudin, R. & Kusuma, D.R. (2016). Kewajaran Nilai Salam Pasca Right Issue. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 1-15.
- Kyswantoro, Y. F. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Human Development Index (Hdi) Pada 6 Daerah Tertinggal Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 113. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5359>
- Lengkong, S. M. K., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1-20. <https://doi.org/10.35794/jpekd.15783.19.2.2017>
- Sukarniati, L. Suropto, Khoirudin, R. (2017). Determinan Kebahagiaan Pemulung (Studi Kasus Di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan. *Jurnal I-Economic*, 3(1), 38-50.
- Mirza, D. S. (2015). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah*, 4(2), 102-113. <https://doi.org/10.15294/jejak.v4i2.4645>
- Muhammad Firman Hardiansah. (2019). Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan. *Journal Unnesa*, 3 no.1(02), 47-54.
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51-69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Munandar, M. A., & Khoirudin, R. (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa. *Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*, 02(01), 56-70.
- Noviatamara, A., Ardina, T., & Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 53-60. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1341>
- Prastiwi, L.F., Handayani, S., & Chaudary, S.K. (2023). Smart Living Tourism: Safe and Comfort Natural Tourism Concept. *Journal of Asset Management and Public Economy*, 2(2), 95-107. <https://doi.org/10.12928/jampe.v2i2.7907>
- Ramadhan, F. H. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 29.
- Rohimah & Khoirudin, R. (2016). Komparasi Tingkat Kesehatan Dual Banking System Antara Divisi Konvensional dan Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 100-118. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v1i2.1999>
- Sania, L., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan UMR Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Bharanomics*, 2(1), 33-46. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.189>
- Sari, E., & Yusniar, R. (2019). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali Tahun 2010-2017. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 128-136.
- Subagyo, & Algifari. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Suropto, Firmansyah, & Sugiyanto, F. X. (2020). Poverty viewed from the perspective of domestic production in Yogyakarta: The Solow growth model approach. *International Journal of Business and Globalisation*, 24(2), 174-184. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2020.105166>
- Suropto, & Istanti. (2009). Characteristics Of Demography, Economic Factors, And Poverty In Gunungkidul Regency. *Economic Journal Of Emerging Markets*, 1(1), 37-45.
- Todaro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Erlangga.
- Wibowo, A. R., & Khoirudin, R. (2019). Analysis of Determinants of Poor Population in Central Java 2008-2017. *Ekilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v14i1.1482>
- Az zakiyyah, N. A., Lubis, F. R. A., & Wahyuni, I. (2023). Determinants of poverty in Indonesia. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 18(2), 210-222.